

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1. Dasar Hukum**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD;
- g. Pengelolaan Tata Usaha Sekretariat DPRD;
- h. Penginventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalahnya;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kepada Bupati;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setwan.

### 3. Aspek Strategis Organisasi

Paradigma baru Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu lembaga Pemerintah Daerah selalu berusaha meningkatkan kinerjanya secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Banjarnegara secara optimal.

Dengan kondisi jadwal kerja DPRD yang padat dan tuntutan dari anggota DPRD untuk selalu segera terfasilitasi segala kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menyebabkan ada beberapa tugas pokok Sekretariat DPRD yang pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah karyawan, selain itu juga DPRD belum seluruh anggotanya mampu mengoperasikan dan mempunyai fasilitas yang mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menerapkan TNDE.

### 4. Struktur Organisasi

#### 1. Komposisi Personalia

Komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini terdiri atas :

- |         |            |
|---------|------------|
| 1) PNS  | = 45 orang |
| 2) CPNS | = - orang  |

3) PTT = 2 orang

Sedangkan berdasarkan strata / penjenjangan pendidikan formal yang dimilikinya, komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai dengan saat sekarang yaitu :

- 1) PNS berpendidikan S2 = 2 orang
- 2) PNS berpendidikan S1 = 10 orang
- 3) PNS berpendidikan D.II/D.III/Sederajat = 3 orang
- 4) PNS berpendidikan SLTA / Sederajat = 27 orang
- 5) PNS berpendidikan SLTP / Sederajat = 1 orang
- 6) PNS berpendidikan SD / Sederajat = 2 orang

Dengan mengacu kepada keadaan sekarang, keberadaan PNS dan non-PNS di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dirasa kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Untuk itu kami telah mengajukan permohonan penambahan SDM baik PNS maupun Non PNS. selain itu juga dalam menghadapi era globalisasi ini dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui diklat penjenjangan maupun non formal.

## 2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD, eselon II.b = 1 orang
- 2) Kepala Bagian, eselon III.a = 3 orang
- 3) Kepala Sub Bagian, eselon IV.a = 7 orang

Secara keseluruhan data pegawai dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**TAHUN 2015**

NO	Golongan / Ruang	Jenis kepegawaian		Jenjang Pendidikan					
		CPNS	PNS	SD	SLTP	SLTA	D.III	S1	S2
1	I.a	-	-	-	-	-	-	-	-
2	I.b	-	1	1	-	-	-	-	-
3	I.c	-	1	-	1	-	-	-	-
4	I.d	-	-	-	-	-	-	-	-
5	II.a	-	2	1	-	1	-	-	-
6	II.b	-	20	-	-	20	-	-	-
7	II.c	-	4	-	-	4	-	-	-
8	II.d	-	-	-	-	-	1	-	-
9	III.a	-	2	-	-	-	-	-	-
10	III.b	-	4	-	-	2	1	-	-
11	III.c	-	2	-	-	-	-	2	-
12	III.d	-	7	-	-	-	1	6	-
13	IV.a	-	-	-	-	-	-	-	-
14	IV.b	-	3	-	-	-	-	2	1
15	IV.c	-	1	-	-	-	-	-	1
16	IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	45	2	1	27	3	10	2

**Tabel 2**  
**DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**TAHUN 2014**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	2	
2	S1	10	
3	D.III	3	
4	SLTA	27	
5	SLTP	1	
6	SD	2	
Jumlah		45	

**Tabel 3**  
**DATA PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	-	-
2	S1	-	-
3	D.III	-	-
4	SLTA	2	-
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
Jumlah		2	-

## **B. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yang harus yaitu meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya isu-isu strategis digunakan sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program untuk lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis, menganalisis hambatan dan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh.

### **1. Rencana Strategis**

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan bagi DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
4. Meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan

### **2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran**

1. Potensi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih rendah
2. Perencanaan kegiatan belum masih terfokus pada tahun-tahun yang sebelumnya dan masih ragu dalam melakukan inovasi kegiatan
3. Masih adanya beberapa program dan kegiatan yang belum mencerminkan kualitas kegiatan yang efektif, tepat sasaran dan tepat guna dan tepat manfaat.
4. Pelaksanaan tupoksi belum maksimal dan kerjasama antara tim pengelola anggaran belum berjalan sesuai harapan .

### **3. Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran antara lain**

1. Mengusulkan penambahan staf ke- BKD Kab. Banjarnegara sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan serta mendukung karyawan/i untuk berpartisipasi dalam bimtek peningkatan kapasitas SDM.
2. Perencanaan kegiatan perlu lebih dimatangkan dan koordinasi antar tim pengelola anggaran lebih ditingkatkan.

3. Perlunya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai program.
4. Kesadaran, tanggung jawab, dan kerjasama karyawan/i di lingkungan Setwan perlu ditingkatkan melalui pembinaan (*staf meeting*) secara berkala.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seiring telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan beriringan dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yang besangkutan didalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2016 yaitu **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD UNTUK MENGHANTARKAN BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA “**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai misi :

- a. Peningkatan tertib administrasi;
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
- c. Peningkatan kualitas SDM;



d. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

Dalam melaksanakan beberapa misinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu Tahun 2015 baru melaksanakan 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan total jumlah anggaran Rp. 15.077.501.000, Untuk Mencapai sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menjabarkannya lebih lanjut kedalam 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keenam program tersebut dicapai melalui 22 kegiatan sebagaimana berikut :

1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	109.260.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	37.500.000
3	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Rp.	26.685.000
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	3.092.647.000
5	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	Rp.	132.058.000
6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	33.500.000
7	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	270.995.000
8	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Rp.	8.321.000
9	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	160.290.000
10	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Rp.	638.000.000
11	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	84.500.000
12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp.	269.868.000
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp.	21.705.000
14	Pembahasan rancangan peraturan daerah (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	Rp.	558.170.000
15	Kegiatan Reses	Rp.	1.464.750.000
16	Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan	Rp.	5.004.750.000

	Dalam Daerah		
17	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp.	2.857.575.000
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	75.500.000
19	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	Rp.	13.300.000
20	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	Rp.	139.704.000
21	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	Rp.	28.526.000
22	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	Rp.	49.820.000

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Tahun Anggaran 2015, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan yang dicapai, selanjutnya diukur dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan baik.

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**HASIL CAPAIAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa dan perlengkapan kantor	100% (5 unit)	100 % (5 unit)	100%
	Jumlah pengelola keuangan yang terpenuhi jasa administrasi keuangannya	9 orang	9 orang	100%
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan	100% (25 unit)	100% (25 unit)	100%

kantor			
Persentase pemenuhan bahan logistic kantor	100% (15 paket/jenis)	100% (15 paket/jenis)	100%
Jumlah tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya	13 orang	13 orang	100%
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 paket	2 paket	100%
Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15 unit	15 unit	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	100% (31 unit)	100% (31 unit)	100%
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 unit	12 unit	100%
Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	180 set	180 set	100%
Persentase terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100% (3 kegiatan)	100% (3 kegiatan)	100%
Jumlah Raperda Inisiatif DPRD yang tersusun	5 raperda	5 raperda	100%
Jumlah Raperda yang dibahas	21 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	21 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	100%
Jumlah perda yang ditetapkan	5 perda	5 perda	100%

	Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap	45 paket / 3 tahap	45 paket / 3 tahap	100%
	Jumlah anggota DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang pelaksanaan tugas DPRD	45 orang	43 orang	95%
	Jumlah anggota DPRD dan sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang pelaksanaan tugas DPRD	50 orang (20 kegiatan)	47 orang (20 kegiatan)	95%
	Persentase legislatif dan eksekutif yang meningkat referensinya dalam pelaksanaan tugas	7 jenis buku	7 jenis buku	100%
	Jumlah perda yang tersosialisasi	5 perda	5 perda	100%
	Persentase kinerja legislatif yang tersosialisasi	4 edisi	4 edisi	100%
	Jumlah himpunan produk-produk DPRD yang di cetak	50 jenis (1 Buku)	50 jenis (1 Buku)	100%
	Persentase terpeliharanya software/ program/ Sistem informasi	(100%) 1 paket	(100%) 1 paket	100%

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 sebagian besar tercapai 100% hal ini dikarenakan :

1. Perencanaan diawal tahun untuk beberapa program kerja cukup baik dengan penyesuaian anggaran yang tersedia.
2. Struktur manajemen yang mampu merencanakan, pembagian jobs description, target capaian yang jelas dan pelaksanaan itu sendiri.
3. Pelaksanaan studi komparasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja baik DPRD maupun sekretariat DPRD.
4. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan analisis dalam evaluasi manajemen sehingga tetap pada alur program yang sudah direncanakan.

Adapun program kerja yang belum tercapai 100% yaitu pada program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada indikator kinerja jumlah anggota DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD dan jumlah anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas DPRD tidak tercapai 100% dikarenakan adanya anggota DPRD yang tidak bisa melaksanakan tugas (adanya kepentingan pribadi yaitu melaksanakan ibadah haji) sehingga tidak bisa mengikuti agenda DPRD.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	2011	2012	2013	2014	2015
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah administrasi keuangan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	40%	15%	100%	100%	100%
Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	76%	50%	100%	100%	100%
Jumlah Peralatan gedung kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	87%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	87%	100%	100%	100%	100%
Persentase terpenuhinya	87%	100%	100%	100%	100%

penyusunan Laporan Keuangan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
Jumlah Raperda Inisiatif DPRD yang tersusun	0%	0%	100%	70%	100%
Jumlah Raperda yang dibahas	100%	100%	100%	80%	100%
Jumlah perda yang ditetapkan	100%	100%	100%	80%	100%
Jumlah aspirasi masyarakat yang terserap	100%	100%	100%	0%	100%
Jumlah anggota DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	100%	97%	95%
Jumlah anggota DPRD dan sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas DPRD	100%	100%	100%	98%	95%
Persentase legislatif dan eksekutif yang meningkat referensinya dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah perda yang tersosialisasi	-	-	-	-	100%
Persentase legislatif dan eksekutif yang tersosialisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah himpunan produk-produk DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase terpeliharanya software/ program/ sistem informasi	-	-	-	-	100%

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan- peturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan realisasi anggaran. Perlu kami jelaskan bahwa dalam rangka membiayai operasional Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara pada tahun 2015 mendapat anggaran sebesar Rp. 11.288.968.000. Melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp.15.077.501.000 atau kenaikan sebesar 33,55 %. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 11.056.546.615 atau sebesar 73,33 % dengan rincian sebagai berikut.

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 3.398.227.000	Rp. 2.175.250.604	64

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.195.606.000	Rp. 1.110.592.625	92
	Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 269.868.000	Rp. 227.480.968	84
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 21.705.000	Rp. 9.145.000	42
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	Rp. 10.142.275.000	Rp.7.502.176.418	74
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.49.820.000	Rp. 31.901.000	64
<b>JUMLAH</b>		Rp. 15.077.501.000	Rp.11.056.546.615	73

Realisasi keuangan untuk tahun 2015 hanya 73 %, hal itu disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui indikator persentase terpenuhinya penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD belum tercapai 100% meski secara kinerja mencapai target namun dari segi keuangan hanya terserap 42% hal ini



dikarenakan mengalami kesulitan dalam teknis pengelolaan anggaran sehingga lembur PNS tidak dibayarkan.

2. Pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah terdapat agenda pimpinan dan anggota DPRD kunjungan dalam dan luar daerah tidak dilaksanakan sehingga tidak terbayarkan mengingat waktu sudah tidak memungkinkan lagi.
3. Pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada kegiatan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang tidak dilaksanakan sehingga anggaran tidak terserap.
4. Honorarium narasumber pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak terbayarkan karena tugas sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota dan pimpinan DPRD kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah tercapai melihat dari 23 indikator kinerja yang ditetapkan, mampu mencapai keberhasilan sebanyak 19 indikator. Berhasilnya kinerja beberapa kegiatan antara lain disebabkan, hal-hal sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja dijadikan pedoman dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja dan keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang tidak memberi peluang untuk merubah konsep dan implementasi perencanaan baik perubahan terhadap program dan besaran anggaran.
2. Perencanaan program dan penyerapan anggaran disusun secara sistematis melalui rencana kerja operasional Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara.
3. Monitoring dan evaluasi sebagai wahana kontrol dan pengendalian proram mulai dari poses perencanaan sampai outcome yang diharapkan telah dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan sekretariat DPRD untuk mencapai sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan mutu pelaksanaan program antara lain dengan :

1. Pengukuran kinerja perlu disusun melalui kajian terhadap analisis terhadap sasaran yang akan dicapai, potensi yang dimiliki dan hambatan yang ditemukan.
2. Dokumen-dokumen perencanaan sebagai alat pengendali dalam rangka mencapai akuntabilitas publik dengan memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan dan pelaksanaan program.
3. Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan seharusnya memiliki suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indicator keberhasilan suatu program.
4. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara lembaga DPRD dan sekretariat DPRD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015, tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 tak lepas dari peran para pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan laporan ini sehingga dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Dan kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang telah mencermati LKjIP ini, guna bahan penyempurnaan pelaksanaannya dimasa mendatang

Banjarnegara, 2016

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**DONI SUTRISNO, ST,MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19611105 198601 1 003**